

## TAJUK RENCANA

### Memetik Pelajaran dari Setahun Pandemi

**SETAHUN** sudah. Virus Korona yang dulu sempat diremehkan para petinggi negeri, upaya pengendalian penyebarannya ternyata bisa dikatakan, belum membuahkan hasil. Dalam setahun ini tampak upaya melakukan pengendalian virus agar tidak meluas dilakukan terkesan gagap, pada awalnya.

Upaya memastikan pengendalian terkesan 'hiruk pikuk'. Mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hasilnya belum maksimal. Presiden Joko Widodo mengakui, PSBB dan PPKM yang diberlakukan tak efektif. Dalam pertemuan dengan jajaran pemimpin redaksi media, Rabu (17/2) Presiden menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak efektif adalah karena memang kurangnya tidak ada yang melandai turun. Presiden mengajak mengingat data kasus aktif yang terjadi. Menurutnya, mungkin tiga minggu yang lalu, itu masih di angka-angka 14 ribu bahkan 15 ribu. Sekarang minggu-minggu terakhir kemarin ini, sudah di 8 ribu-9 ribu.

Datanya tidak salah! Namun yang perlu dilihat, data angka kasus aktif dalam sepekan terakhir ini juga masih fluktuatif. Karena penambahan kasus positif pada 15/2 secara nasional mencapai 6.462 kasus, 16/2 berada di 10.029, 17/2 di angka 9.687, 18/2 di angka 9.039 dan 19/2 angkanya naik menjadi 10.624 meski di 20/2 menjadi 8.054. Apalagi kita tentu tidak bisa mengabaikan angka kematian untuk melihat tingkat keparahan pandemi.

Setahun berlangsung. Evaluasi yang dilaksanakan merumuskan kebijakan revisi dengan melakukan PPKM skala mikro, sejak 9 Februari lalu. Dan evaluasi pemerintah menyebutkan PPKM skala mikro termonitor bisa menekan pelbagai kriteria yang ditetapkan dalam menangani Covid-19. Selama

penerapan PPKM skala mikro, menurut Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto trend kasus aktif di 5 provinsi : DKI, Jabar, Banten, DIY dan Jatim, berhasil turun. Jumlah kasus aktif mengalami penurunan secara signifikan secara nasional, 17,27% dalam sepekan. Sehingga pemerintah memutuskan PPKM skala mikro Jawa Bali yang mestinya berakhir 23 Februari, diperpanjang hingga 8 Maret mendatang. (KR, 21/2).

Apa artinya? Ada banyak pelajaran bisa kita petik dalam perjalanan setahun pandemi Covid-19. Hanya sebaiknya, kita jangan terburu-buru melakukan klaim penurunan kasus.

Bahkan setahun pandemi memberi pelajaran utama bila yang perlu ditingkatkan adalah membangkitkan kesadaran semua komponen bangsa memahami dan menyadari bila Covid-19 memang ada dan kini, vaksinasi perlu dilakukan. Ini adalah pengendalian utama Covid-19. Selain tentu saja, pelaksanaan 3T (*tracing, tracking dan treatment*) tidak boleh berhenti selama pandemi masih terjadi. Dan disiplin 5M: mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, tetap harus dilaksanakan.

Pelajaran kehidupan banyak kita dapat dalam setahun terjadi pandemi. Yang pasti, semua sudah letih, ingin kembali normal. Namun seperti kata Juru Bicara Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito status 'bebas Covid-19' bisa tercapai bila Indonesia sanggup menunjukkan perbaikan signifikan minimal empat indikator. Yakni penurunan kasus positif harian, penurunan kasus aktif, peningkatan kasus sembuh, dan penurunan angka kematian. Dan ini menuntut kesadaran, perjuangan dan pengorbanan semua anak bangsa. □

## Perlukan Badan Manajemen Sampah Plastik Nasional?

**SEBUAH** pencapaian masuk dalam salah satu jajaran negara teratas di dunia adalah kebanggaan tersendiri bagi suatu bangsa, apalagi peringkat ke-2. Tapi nanti dulu. Dua besar pencapaian ini adalah negara ke-dua penyumbang terbesar sampah plastik di dunia. Menurut Asosiasi Industri Plastik Indonesia (Inaplas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) setidaknya Indonesia menghasilkan 64 juta ton per tahun, dengan 2,3 ton di antaranya dibuang ke laut.

Plastik di lautan akan menjadi partikel kecil, mikroplastik. Mikroplastik ini berbahaya karena dapat terdeposit di dalam tubuh ikan, yang pada akhirnya juga akan dikonsumsi manusia. Sampah plastik memang menjadi persoalan yang seolah-olah tidak bisa diatasi. Padahal Pemerintah pada 2018 lalu telah menyiapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) (2018 - 2025) sebagai pengejawantahan dari PP No 83 Th 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. RAN telah berjalan selama 3 tahun, namun apakah efektif?.

### Tidak Tegus

Kebijakan terkait sampah plastik terkesan hanya formalitas dan tidak tegas. Misalnya kebijakan diet plastik dengan kantong plastik berbayar. Konsumen dikenakan beban pembelian kantong plastik hanya Rp 200. Harga tersebut bukan sesuatu yang merisaukan konsumen untuk mengeluarkan biaya 'receh' tambahan demi tetap menggunakan kantong plastik. Diet plastik untuk masyarakat secara umum masih bersifat imbauan, terkesan tidak serius.

Apakah ada alternatif cara mengendalikan sampah plastik yang lebih efektif? Pasti ada! Namun untuk menghilangkan dalam waktu sekejap tidak mungkin. Penggunaan kantong plastik telah menjadi kebiasaan bahkan budaya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain di dunia. Untuk mengubah, membutuhkan waktu yang tidak singkat dan perhatian khusus.

### TB Putra Prakarsa

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan sebagai momentum Peringatan Hari Smpah Nasional 21 Februari, adalah membentuk badan nasional atau bahkan kementerian khusus. Misalnya bernama Badan Manajemen Sampah Plastik Nasional. Tentu sebelum badan ini dibentuk, terlebih dahulu dibuat undang-undang khusus mengatur pengelolaan sampah plastik. Salah

*Apakah ada alternatif cara mengendalikan sampah plastik yang lebih efektif? Pasti ada! Namun untuk menghilangkan dalam waktu sekejap tidak mungkin. Penggunaan kantong plastik telah menjadi kebiasaan bahkan budaya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain di dunia.*

satu isi dari undang-undang tersebut mengamanahkan untuk membentuk Badan Manajemen Sampah Plastik Nasional (BMSPN).

Badan ini dibentuk dan diberi wewenang undang-undang yang khusus untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Tugas utama badan ini adalah menanggulangi permasalahan sampah plastik secara menyeluruh. Sebagai contoh lembaga memiliki wewenang membuat detail dokumen manajemen plastik nasional. Detail tersebut mengatur manajemen plastik di berbagai lembaga/institusi/badan hukum hingga rumah tangga beserta *reward dan punishment*-nya. Bersama kementerian dan lembaga

terkait lainnya memasukkan unsur rencana/model pengelolaan sampah plastik dalam dokumen izin pendirian usaha, layaknya dokumen Amdal. Mengaudit semua lembaga/institusi/badan hukum termasuk level kelurahan/desa secara berkala sesuai waktu yang telah ditentukan. Tugas dilakukan auditor plastik. Penerapan audit plastik ini harus bersamaan *reward dan punishment* yang tegas.

### Penyumbang

Pemikiran membentuk Badan Manajemen Sampah Plastik Nasional hanya mencoba untuk mengatur dan mengawasi secara ketat permasalahan sampah plastik yang selama ini tidak pernah terselesaikan. Pembentukan badan juga berpotensi berbenturan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi. Karena saat ini industri makanan dan minuman sedang berkembang dengan sangat pesat, dan termasuk salah satu penyumbang sampah plastik besar. Sangat dimungkinkan, investor bidang ini akan berfikir ulang untuk masuk ke Indonesia. Mengingat tuntutan dari peraturan terkait manajemen sampah plastik, tidak menguntungkan.

Terlepas dari itu semua, model manajemen sampah plastik sebaik apapun tanpa kesadaran akan masa depan kelangsungan kehidupan di bumi ini, mustahil untuk bisa berjalan dengan baik. □

*\* Tatag Bagus Putra Prakarsa MSc, Dosen Prodi Biologi, Jurdik Biologi FMIPA UNY*

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : [opini@kr.com](mailto:opini@kr.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Cagar Budaya Hotel Tugu

### Bagong Suyanto

**CAGAR** budaya sesungguhnya adalah bagian dari warisan dan kekayaan budaya yang harus dilestarikan. Kedaulatan Rakyat dalam tajuknya (20/2) menekankan arti penting melindung cagar budaya di DIY, khususnya eks Hotel Tugu Yogyakarta yang kondisinya kini sangat memprihatinkan.

Bangunan eks Hotel Tugu Yogyakarta dilaporkan kini tidak lagi terurus dan kondisinya rapuh. Hotel yang pernah menjadi kebanggaan Yogyakarta, kini telah berubah menjadi bangunan yang kumuh, rusak. Bahkan mengganggu penampilan Yogyakarta sebagai salah daerah tujuan wisata yang membanggakan. Kini Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid telah memastikan menyiapkan langkah penyelamatan bangunan cagar budaya yang terletak di sisi timur Stasiun Tugu, ujung Jalan Margo Utomo Yogyakarta,

### Secara Teoritis

Dalam UU No 5/1992 tentang Cagar Budaya sebetulnya sudah ditegaskan arti penting pelestarian benda-benda cagar budaya. Sesuai dengan isi Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, di sana telah disebutkan bahwa perlindungan benda cagar budaya pada dasarnya adalah sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian warisan budaya bangsa. Merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jati diri bangsa.

Upaya pelestarian benda cagar budaya, secara teoritis sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah. Juga ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional —termasuk untuk kepentingan pembangunan sektor pariwisata. Tetapi, yang menjadi masalah:

jenis dan cara perlindungan bangunan yang akan dikonservasi. (2) Sanksi hukum terhadap pelanggaran dan pemberian insentif bagi yang melakukan konservasi atau preservasi belum banyak dilakukan. (3) Belum adanya aturan dan kepastian dalam hal pemberian subsidi bagi badan atau perorangan yang berniat untuk melakukan preservasi dan konservasi bangunan cagar budaya.

Mencegah cagar budaya di Yogyakarta tidak terbelakal dan kota ini tidak kehilangan jatidirinya, dibutuhkan penerapan ketentuan hukum secara konsisten. Juga tak kalah penting adalah bagaimana memastikan komitmen para para perencana pembangunan dan pimpinan daerah untuk memelihara eksistensi cagar budaya yang ada. Artinya, ada kesungguhan, komitmen, dan langkah-langkah yang terencana. Sehingga kesempatan membangun kota yang berbudaya dan memiliki jatidiri akan jauh lebih terbuka. □

*\* Prof Dr Bagong Suyanto, Dekan FISIP Universitas Airlangga, pernah meneliti eksistensi cagar budaya di Surabaya*

Disadari bahwa keberadaan dan eksistensi berbagai bangunan dan kawasan cagar budaya sesungguhnya adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah sebuah kota. Di kota besar yang berkembang cepat seperti Yogyakarta, diakui atau tidak keberadaan benda-benda cagar budaya seringkali rawan berubah. Bahkan rawan tergusur karena kurangnya kesadaran masyarakat, intervensi kekuatan komersial maupun karena kurangnya dukungan dana serta ketidakkonsistenan sikap pemerintah kota dalam melindungi benda-benda cagar budaya. Sebagai kota metropolitan yang berkembang pesat, pelan, namun pasti benda-benda cagar budaya yang semestinya dilindungi mulai tergusur dan kawasan-kawasan yang seharusnya dipertahankan peruntukkannya sebagai kawasan budaya, itu pun tak lagi steril dari pengaruh kekuatan komersial.

**Ketentuan Hukum**  
Ada banyak faktor yang menyebabkan upaya pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya acap kali tersendat, bahkan gagal. Studi yang dilakukan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga (2003) memerinci kendala penting yang biasanya terjadi dalam upaya melakukan preservasi dan konservasi bangunan dan kawasan cagar budaya. Seperti: (1) belum adanya petunjuk operasional yang jelas menyangkut

Perwakilan dan Biro:  
**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

**Banjir Jadetabek meluas -- Semua harus waspada**  
\*\*\*  
Dinkes desak insentif nakes segera cair -- **Ingat, mereka di garda depan hadapi Covid-19**  
\*\*\*

Perempunan harus terdepan dalam perang Covid-19 -- **Meski masih dianggap 'kanca wingking'**

*Beraks*

## PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA

[pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com) 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

## Keluarga Miniatur Masyarakat

**DEKADENSI** moral yang terjadi pada beberapa aspek kehidupan multikultural dan polarisasi kehidupan masyarakat pada beberapa tahun terakhir telah mengalami arus balik kovertensi sosial yang memprihatinkan. Hal ini ditandai makin maraknya fenomena kekerasan sosial yang terjadi pada kalangan remaja dan anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah mencatat setidaknya mulai tahun 2011 sampai tahun 2020, ada 40.081 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk bullying baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trendnya terus meningkat.

Keluarga merupakan satuan organisasi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi untuk menentukan karakter suatu bangsa. Menurut Howard Gerner dalam bukunya 'Frame of Mind', kecerdasan dipengaruhi oleh stimulus lingkungan yang sering disebut Crystallizing Experiences yaitu kekuatan energi positif dan semangat yang dimiliki anak karena diperlakukannya baik oleh keluarga. Selanjutnya Paralyzing Experiences yaitu pengalaman negatif atau mematikan semangat seorang anak karena kondisi tekanan di lingkungan keluarga.

Keluarga menjadi miniatur masyarakat dalam mentransformasikan nilai dan karakter. Namun sayangnya dewasa ini keluarga telah menjadi pilihan kedua bagi remaja dan anak-anak. Hal ini terjadi karena sikap apatis anggota keluarga antara satu dan yang lainnya, sehingga

menyebabkan ambiguitas pada psikologi dan pola pikir remaja serta anak-anak. Hasilnya mereka lebih nyaman saat berada di luar rumah daripada di keluarganya.

Di sisi yang lain, kecerdasan remaja dan anak-anak dipengaruhi oleh faktor internal, menurut Dr Ganiel Gole dengan teori Emotional Quotients (EQ) dan Paul G Stolz memunculkan teori Advertisy Quotients (AQ). Selanjutnya, terakhir Lan Marshall dan Danah Zohal dengan teori Spiritual Intelligences (SE). Mereka sepakat sehebat apapun kondisi personality genetic dari setiap anak, namun jika tidak didukung lingkungan keluarga yang baik maka akan menghasilkan insan yang tidak bermoral.

Rekonsiliasi keluarga diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara proporsional. Mencakup perhatian, kasih sayang, dan kenyamanan dalam keluarga. Rekonsiliasi yang dimaksud adalah membangun kembali komunikasi yang baik antar anggota keluarga sehingga keluarga dapat menjadi rumah yang hangat bagi seluruh anak-anak di Indonesia. Tempat mereka belajar, mendapat kepedulian, pujian, penghargaan, dan penanaman nilai-nilai agama dan sosial untuk saling bekerja sama dan saling mendukung. Karenanya dari keluarga akan terlahir bangsa yang besar, bangsa yang tangguh dan saling menghargai dalam indahnya kebhinnekaan.

*\* Eko Prasetyo SPd MPd, Guru dan Staf Kurikulum Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogya.*

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi ( 2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

## Kedaulatan Rakyat

**Pemimpin Umum:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrkyk2@yahoo.com](mailto:iklankrkyk2@yahoo.com), [iklankrkyk13@gmail.com](mailto:iklankrkyk13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%